

MENJADI PEREMPUAN PAPUA YANG BERDAYA (STUDI ANALISA GESI TERHADAP PEREMPUAN PAPUA SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN DAN KOHESI SOSIAL)

Anil Dawan, Andina Mega Larasati

Wahana Visi Indonesia

anil_ais2003@yahoo.com

Abstract

This article aims to describe the results of the GESI analysis. The method used is the GESI (Gender Equality and Social Inclusion) assessment. From the results of the GESI analysis it was found that the role of Papuan women in religious activities was quite high, both in routine religious meetings and involvement in planning religious activity programs and peace education. However, from 4 (four types of involvement) it was found that women's role was only in the "listening position". These results prove that there is an imbalance of systemic decision-making power in society. Thus, capacity building for Papuan women and religious, customary, community and government institutions is needed so that women's roles can be maximized in peace and social cohesion.

Keywords: *GESI, Women, Religion, Capacity Building*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisa GESI. Metode yang digunakan adalah menggunakan assesmen GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*). Dari hasil analisa GESI ditemukan bahwa peran perempuan PAPUA dalam kegiatan keagamaan cukup tinggi, baik dalam pertemuan rutin keagamaan dan keterlibatan dalam perencanaan program kegiatan keagamaan serta pendidikan perdamaian. Akan tetapi tetapi dari 4 (empat jenis keterlibatan) ditemukan bahwa peran perempuan hanya pada "posisi mendengarkan". Hasil ini membuktikan bahwa terjadi ketidakseimbangan kekuatan pengambilan keputusan sistemik dalam masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan pengembangan kapasitas terhadap perempuan Papua dan kelembagaan agama, adat, masyarakat dan pemerintah supaya peran perempuan dapat dimaksimalkan dalam perdamaian dan kohesi sosial.

Kata Kunci: *GESI, Perempuan, keagamaan, pengembangan kapasitas.*

Masuk : 15 Februari 2023

Review : 1 – 8 Maret 2023

Diterima : 21 Maret 2023

Pendahuluan

Saat ini kita sebagai bangsa Indonesia menghadapi tantangan tentang potret buram menyikapi perbedaan atau pluralitas. Perbedaan dianggap ancaman dan fakta yang disangkal. Orang lain yang berbeda dianggap sebagai lawan dan musuh yang harus disingkirkan dan dihilangkan. Tiada penghargaan dan saling menghormati, kemanusiaan diabaikan karena fanatisme dan egoisme kelompok dan golongan. Namun di tengah situasi seperti, di konteks Papua khususnya, masih memiliki harapan karena perempuan di Papua memiliki potensi besar sebagai agen perdamaian dan pembangun kerukunan serta kohesi sosial dalam masyarakat. Pendekatan yang mengintegrasikan analisa *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) diperlukan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika konflik, bahwa laki-laki dan perempuan mengalami dan dipengaruhi oleh konflik secara berbeda sehingga upaya membangun perdamaian dan kohesi sosial juga harus sensitif gender.

Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai kerentanan perempuan, namun belum banyak yang mengaitkannya dengan pembangunan perdamaian (*peacebuilding*). Kebaharuan dari artikel ini adalah pada upaya melihat potensi partisipasi perempuan yang tinggi dalam Lembaga keagamaan, namun potensi ini belum dimaksimalkan ditengah masyarakat untuk mendorong kaum perempuan Papua menjadi agen perdamaian dan kohesi sosial di tengah-tegah komunitas. Demikian juga pengembangan kapasitas Perempuan yang berspektif gender perlu melibatkan tiga batu tungku, yaitu lembaga agama, lembaga adat dan juga pemerintah sehingga pengembangan kapasitas perempuan untuk kerukunan, perdamaian dan kohesi social dapat berjalan selaras, dan harmonis dari ketiga *stake holder* tersebut

Metode

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif *assessment Gender Equality dan Social Inclusion (GESI)*, *Triple Role Caroline Moser* dan Model Komponen Psikososial dari Perdamaian yang Berkelanjutan terhadap Perempuan Papua yang dilakukan di Biak, Jayapura dan Wamena dan juga beberapa analisa data sekunder penunjang yang bersesuaian dengan penelitian ini. Informan data *assessment* melibatkan kaum Perempuan di tiga kabupaten tersebut. Selanjutnya dilakukan analisa deskriptif GESI menjawab kesenjangan antara tingginya angka partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan, menerima pendidikan damai, namun disaat bersamaan terjadi kerentanan konflik domestik dan publik dimana perempuan menjadi korban dari konflik tersebut. Artikel juga mengusulkan program pengembangan kapasitas perempuan, yang lebih berfokus pada pengembangan kapasitas perempuan Papua dengan menggunakan pendekatan akses terhadap asset dan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan dan perdamaian. Secara khusus mendeskripsikan potensi perempuan sebagai agen perdamaian dan kohesi sosial di tengah masyarakat. Pintu masuk yang dieksplorasi adalah partisipasi perempuan dalam keagamaan yang tinggi, keterlibatan dalam perencanaan program dan menerima pendidikan perdamaian. Artikel ini juga mengusulkan langkah-langkah pengembangan kapsitas yang dilakukan untuk memaksimalkan peran perempuan, termasuk penggunaan modul yang dikembangkan untuk melakukan pengembangan kapasitas perempuan untuk perdamaian dan kohesi sosial.

Hasil dan Pembahasan

Assesmen GESI

Studi mengenai gender telah lama mengungkap ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang berimplikasi pada kerentanan perempuan. GESI (*Gender Equality & Social Inclusion*) sebagai proses transformasi banyak segi yang mempromosikan akses, pengambilan keputusan, partisipasi, dan well-being yang

setara dan inklusif bagi mereka yang paling rentan. Mengubah sistem, norma sosial, dan relasi-relasi untuk memungkinkan mereka yang paling rentan berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang sama dari intervensi pembangunan. Membangun agensi, resiliensi, dan aksi individu dan kolektif. Mempromosikan pemberdayaan dan well-being bagi anak-anak, keluarga, dan komunitas rentan. Berdasarkan teori perubahan tersebut, maka asesmen GESI ini bertujuan untuk mengukur kerentanan perempuan sebagai berikut:

1. Akses: menilai akses perempuan terhadap aset, sumber daya, layanan, dan manfaat dalam aspek *livelihood* dan upaya perdamaian.
2. Partisipasi: menilai partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam urusan sosial yang dapat mengembangkan diri mereka.
3. *Decision making*: menilai keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait upaya-upaya *livelihood* dan perdamaian.
4. Sistem: melihat sejauh mana sistem/struktur dalam komunitas setara dan inklusif untuk mempromosikan kebutuhan perempuan dalam upaya *livelihood* dan perdamaian.
5. *Well-being*: melihat sejauh mana sistem/struktur dalam komunitas setara dan inklusif untuk mempromosikan kebutuhan perempuan dalam upaya *livelihood* dan perdamaian.

Kerentanan perempuan dihasilkan dari suatu eksklusi terhadap perempuan yang dilakukan secara sistematis yang terutama disesuaikan dengan kebutuhan laki-laki (Straechle, 2016). Dengan situasi demikian, ketika terjadi konflik, maka posisi perempuan akan menjadi rentan karena eksklusi yang sistematis menyebabkan perempuan mengalami hambatan-hambatan dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi di masyarakat, dan pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang terkait kepentingan perempuan itu sendiri, khususnya terkait masalah atau konflik yang dihadapinya. Berdasarkan hasil asesmen GESI di kabupaten Jayapura,

Jayawijaya, dan Biak, partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan cukup tinggi (72,8% aktif dalam kegiatan keagamaan; 84,70% terlibat dalam pertemuan rutin; dan 63,64 terlibat dalam perencanaan program di kegiatan keagamaan) di ketiga wilayah. Sebanyak 83.81% perempuan juga mengaku telah menerima pendidikan perdamaian. Meskipun perempuan sering hadir di kegiatan keagamaan cukup tinggi, namun level partisipasi perempuan di kegiatan kampung cenderung rendah di ketiga wilayah (Kabupaten Biak, Jayawijaya, Jayapura). Dari empat tingkat partisipasi (hanya mendengarkan-memberi pendapat-membuat keputusan-menjalankan keputusan), secara keseluruhan persentase tertinggi adalah pada posisi “hanya mendengarkan”. Melalui analisis GESI diakui adanya ketidakseimbangan kekuatan sistemik dalam pengambilan keputusan masyarakat yang mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, serta peningkatan risiko kekerasan berbasis gender jika terjadi konflik.

Gender, Kerentanan Perempuan, dan Konflik

Kajian awal menemukan bahwa perempuan mengalami kerentanan karena keterbatasan partisipasi di ruang publik termasuk terkait mekanisme penyelesaian konflik (WVI dan Tulodo, 2022). Hal ini menyebabkan perempuan tidak dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang terkait kepentingannya sendiri. Kajian juga menemukan di antara jenis-jenis konflik yang muncul yaitu laki-laki memukul perempuan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender terutama jika didasarkan pada relasi gender. Konflik destruktif sesuai dengan gambaran rata-rata responden kajian awal yang cenderung menyebut atau mengaitkan konflik secara negatif. Kajian ini menggunakan *Triple Role Caroline Moser* dan Model Komponen Psikososial dari Perdamaian yang Berkelanjutan Coleman (2012) sebagai acuan.

Relevansi model komponen Coleman yaitu pada pemilahan dua orientasi yaitu pencegahan konflik destruktif dan mempromosikan perdamaian berkelanjutan. Faktor-faktor penting dalam pencegahan konflik destruktif sebagaimana

teridentifikasi dalam penelitian awal yaitu memiliki pendapatan yang cukup, memiliki rumah yang layak, memiliki jaminan pendidikan, akses kesehatan yang mudah, serta lingkungan yang bebas dari kekerasan yang sebenarnya mencerminkan kebutuhan dasar manusia dan hal ini sejalan dengan konsep pencegahan konflik destruktif di tingkat mikro Coleman (2012). Dengan demikian dalam upaya pencegahan konflik perlu diselaraskan dengan intervensi peningkatan pendapatan keluarga, ketersediaan kebutuhan papan atau rumah yang layak, jaminan pendidikan dan kesehatan serta menciptakan lingkungan nir kekerasan melalui mekanisme penyelesaian masalah melalui pendekatan keagamaan, musyawarah adat ataupun hukum positif yang mengedepankan *restorative justice*.

Selain adanya kebutuhan dasar manusia di tingkat mikro, kajian awal juga menemukan bahwa salah satu aspek yang dapat menimbulkan konflik destruktif yaitu relasi gender yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (WVI & Tulodo, 2022). Coleman (2012) mengemukakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender di rumah, sekolah, maupun di tempat kerja merupakan salah satu hal yang esensial untuk mencegah konflik yang destruktif di level meso. Selain kesetaraan dan keadilan gender, di level individu atau pasangan atau keluarga atau mikro, salah satu aspek yang esensial untuk mencegah konflik destruktif yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kedua aspek atau faktor tersebut sebenarnya merupakan bagian dari Model Komponen Psikososial dari Perdamaian yang Berkelanjutan (Coleman, 2012). Model komponen psikososial dari perdamaian berkelanjutan ini merupakan hasil rangkuman dari 17 tulisan mengenai upaya membangun perdamaian di berbagai penjuru dunia yang diklasifikasikan berdasarkan tingkatan (mikro, meso, makro) dan orientasinya (pencegahan konflik destruktif dan mempromosikan perdamaian berkelanjutan). Meskipun pada dasarnya setiap aspek dapat berdiri sendiri, namun beberapa aspek saling berkaitan satu sama lain. Untuk dapat mempromosikan perdamaian yang berkesinambungan, maka penting untuk melihat bagaimana aspek pencegahan konflik destruktif di level mikro, meso, dan makro terpenuhi.

Berkaitan dengan perspektif kerentanan perempuan, asesmen ini mengacu pada *Triple Role Caroline Moser* (1993). Caroline Moser mengembangkan kerangka kerja untuk perencanaan dan pembangunan gender melalui peran produktif, reproduktif, dan pengelolaan komunitas. Peran produktif merujuk pada peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan yang berbayar atau semacamnya. Peran reproduktif melibatkan pembagian peran tugas dan tanggung jawab domestik yang berkaitan dengan kesejahteraan rumah tangga seperti pengasuhan, kegiatan memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya. Pengelolaan komunitas dan peran politik terbagi atas dua macam, yaitu kegiatan di tingkat komunitas sebagai perpanjangan dari peran reproduktif yang bersifat sukarela dan tidak berbayar, serta peran politik yang mengelola komunitas secara formal dan pada tingkatan politis yang biasanya berbayar dan meningkatkan kekuasaan.

Kerangka kerja yang dibuat Moser ini mampu menampilkan kerentanan perempuan yang dipicu beban berlebihan (*overburden*) pada peran reproduktif dan mengurangi kesempatan perempuan untuk meningkatkan peran produktif dan pengelolaan komunitas. Maka, bersama institusi agama, institusi adat, dan institusi kampung: pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mengintrodusir, mendialogkan, dan mencari alternatif solusi yang sensitif gender tentang isu-isu yang membawa kerentanan pada perempuan dan anak, seperti perkawinan anak, hak anak yang dilahirkan diluar pernikahan, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan perempuan tanpa pasangan yang memiliki anak. Mempromosikan peran-peran non tradisional kepada perempuan dan laki-laki untuk mengikis stereotip yang melemahkan perempuan. Selanjutnya perlu membuat kesepakatan seluruh tetua adat, Dewan Adat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama sesungguhnya adalah modal sosial baru. Ini adalah kesepakatan bersama yang menjadi energi untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Penting juga merumuskan kesepakatan lanjutan untuk acuan ke arah mana revitalisasi budaya yang sudah berhasil di tahap awal yang telah dikembangkan dan akan dikembangkan.

GESI atau Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial adalah situasi atau kondisi yang memberi perempuan dan anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki, kenikmatan yang sama atas hak asasi manusia, barang-barang yang bernilai secara sosial, peluang, dan sumber daya. Ini termasuk memperluas kebebasan dan suara, meningkatkan dinamika dan relasi kuasa, mengubah peran gender, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan sehingga perempuan dan laki-laki mencapai potensi penuh mereka. Inklusi sosial berupaya mengatasi ketidaksetaraan dan atau pengucilan populasi rentan dengan meningkatkan persyaratan partisipasi dalam masyarakat dan meningkatkan peluang, akses ke sumber daya, suara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Inklusi sosial berusaha untuk mempromosikan pemberdayaan dan memajukan masyarakat dan institusi yang damai dan inklusif.

Ada lima domain perubahan yang diperlukan untuk menghasilkan kesetaraan gender dan inklusi sosial yang lebih besar. Kelima domain itu adalah Akses: kemampuan untuk mengakses, menggunakan, dan atau memiliki aset, sumber daya, peluang, layanan, manfaat, dan infrastruktur. Pengambilan keputusan: kemampuan untuk membuat keputusan tanpa paksaan di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Ini dapat mencakup kontrol atas aset dan kemampuan untuk membuat keputusan dalam kepemimpinan. Partisipasi: kemampuan untuk terlibat dalam urusan sosial dan dalam sistem kekuasaan yang mempengaruhi dan menentukan perkembangan, aktivitas kehidupan, dan hasil. Sistem: ketersediaan sistem yang setara dan inklusif yang mempromosikan kesetaraan, memperhitungkan kebutuhan yang berbeda dari populasi yang rentan, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk keterlibatan mereka.

Well-being: rasa berharga, status kemampuan, kepercayaan diri, martabat, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan fisik, emosional, psikologis, dan spiritual secara keseluruhan. Ini termasuk hidup bebas dari kekerasan berbasis gender, HIV, dan segala bentuk stigma dan diskriminasi. *Well-being* adalah prasyarat untuk

mendapatkan manfaat dari akses, pengambilan keputusan, partisipasi, dan sistem yang adil dan inklusif. Tanpa *well-being*, mereka yang paling rentan akan tereksklusi dari program perbaikan di domain lain; dan tanpa perubahan dalam akses, pengambilan keputusan, partisipasi dan sistem, kesejahteraan mereka tidak akan berubah dalam jangka panjang. Selain itu, karena marginalisasi dan pengucilan didasarkan pada sistem atau hubungan yang tidak setara dan konstruksi sosial seperti 'ras', 'gender' dan 'status disabilitas', semua domain dipengaruhi oleh struktur, norma dan hubungan sosial yang ada. Semua program perlu mengidentifikasi dan menangani norma dan hubungan kekuasaan yang mendasari yang berdampak pada kelima domain GESI dan di semua tingkat ekosistem.

Perempuan Papua dalam Konteks Perdamaian dan Kohesi Sosial

Konflik merupakan sebagai suatu kondisi yang menyertai kegiatan-kegiatan yang tidak bersesuaian (Deutsch, 1973 dalam Coleman, 2012) atau persepsi kepentingan yang berbeda (Pruitt & Kim, 2004 dalam Coleman, 2012) namun tidak selalu merupakan kondisi yang tidak sehat (Coleman, 2012). Kajian awal yang dilakukan Wahana Visi Indonesia dan Tulodo (2021) juga mengidentifikasi pandangan responden di Jayawijaya, Jayapura dan Biak Numfor mengenai konflik. *Pertama*, konflik merupakan masalah yang bersumber dari perbedaan sudut pandang. *Kedua*, konflik dipicu oleh harga diri yang terancam. *Ketiga*, konflik memiliki bentuk berupa kekerasan fisik maupun verbal. *Keempat*, konflik dipandang sebagai hal yang negatif sehingga cenderung dihindari. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa konflik pada dasarnya merupakan suatu proses yang alamiah ketika terjadi persepsi perbedaan kepentingan dan kegiatan yang tidak saling bersesuaian.

Namun dalam konteks masyarakat Papua, konflik cenderung merujuk kepada perbedaan sudut pandang yang diwujudkan melalui perilaku kekerasan fisik maupun verbal sebagai bentuk sikap defensif sehingga dianggap negatif. Kajian awal juga mengidentifikasi berbagai jenis konflik yang memicu disintegrasi sosial antar

individu maupun kelompok. Konflik yang melibatkan antar individu yaitu pertengkaran, perkelahian antar laki-laki, laki-laki memukul perempuan, dan perkelahian antar perempuan. Sumber atau penyebab konflik yang paling banyak muncul yaitu pengaruh alkohol serta narkoba. Selain antar individu, konflik juga dipersepsi dalam lingkup yang lebih luas yang melibatkan kelompok yaitu tawuran, konflik antar suku, konflik terkait sengketa, dan konflik terkait pemilihan kepala daerah (WVI dan Tulodo, 2022).

Disebutkan juga dalam survei lainnya bahwa ancaman terhadap kerukunan di Papua adalah terkait dengan kepentingan politik. Segregasi di masyarakat terkait pendukung partai politik harus diwasapadai karena mencapai nilai yang rendah hanya sekitar 55%. Oleh karenanya Partai Politik harus berusaha melakukan pencerdasan kesadaran berpolitik, sehingga perbedaan afiliasi parpol tak berujung dengan gesekan di akar rumput. Politik identitas harus dijauhi sejauh-jauhnya, sedangkan politik hati nurani yang memajukan etika politik yang beradab harus dijunjung setinggi-tingginya. Potensi gesekan tersebut juga dipicu oleh kebiasaan buruk maraknya minuman keras yang sejak lama menjadi keprihatinan berbagai pihak. Minuman keras menyebabkan mabuk dan hilang kesadaran diri untuk memiliki nalar sehat dan juga berpikir cerdas. Selain itu dari aspek kesehatan, menenggak minuman keras dalam jangka panjang akan menyebabkan berbagai penyakit, terutama kangker hati.

Dalam pelatihan Membangun Paradigma Inklusif (MPI) semiloka, para pemimpin gereja dan STT di Papua juga menyebutkan bahwa persoalan miras adalah ancaman bagi generasi muda dan keluarga Papua, yang bisa melumpuhkan potensi untuk bertumbuh dan maju. Harapan tentang tumbuhnya kohesivitas kaum muda, dilevel mikro (skala kecil) dan meso (skala menengah) terjalin erat kuat melampaui batasan-batasan kesukuan (A. Dawan, 2022). Hal itu dibuktikan dari kesediaan mereka menjadikan tetangga sebagai pilihan untuk meminta bantuan yaitu mencapai 52%. Dengan demikian kohesivitas itu harus diperkuat melalui perspektif Keagamaan

tentang kerukunan. Oleh karenanya kesadaran berpolitik secara sehat dan kampanye anti miras menjadi bagian dari upaya untuk melibatkan kaum perempuan dan laki-laki dalam langkah preemtif, preventif dan promotive di keluarga, lembaga agama, lembaga adat dan pemerintah dengan dinas-dinas terkait. Perdamaian merujuk kepada kehidupan yang harmonis dengan kerabat dan komunitasnya. Perdamaian juga dimaknai dengan ketiadaan konflik yang dapat berdampak negatif, dan adanya keteraturan yang ditandai dengan sikap tunduk pada aturan gereja dan pemerintah (WVI dan Tulodo, 2022). Perdamaian juga dapat dipersepsi sebagai ketenangan hidup. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketenangan hidup atau kedamaian hidup yaitu memiliki pendapatan yang cukup, memiliki rumah yang layak, memiliki jaminan pendidikan, akses kesehatan yang mudah, serta lingkungan yang bebas dari kekerasan (WVI dan Tulodo, 2022).

Dengan demikian, perdamaian merupakan suatu kondisi di mana individu atau masyarakat merasakan adanya situasi yang harmonis dengan ketiadaan konflik, dan adanya keteraturan atau kepatuhan terhadap institusi keagamaan (misalnya, gereja) dan pemerintah. Faktor-faktor yang mendukung kedamaian atau ketenangan hidup bersumber dari kebutuhan fisiologis melalui terpenuhinya kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang memberikan rasa aman. Faktor-faktor yang mendukung kedamaian atau ketenangan hidup tersebut pada dasarnya memang mencerminkan kebutuhan dasar manusia yang jika terpenuhi dapat berkontribusi pada pencegahan konflik destruktif (Coleman, 2012).

Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan analisa GESI ditemukan terjadi adanya ketidakseimbangan kekuatan sistemik dalam pengambilan keputusan masyarakat yang mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, serta peningkatan risiko kekerasan berbasis gender jika terjadi konflik dalam

konteks Perempuan Papua. Kerentanan perempuan yang dipicu beban berlebihan (*overburden*) pada peran reproduktif dan mengurangi kesempatan perempuan untuk meningkatkan peran produktif dan pengelolaan komunitas marginalisasi dan pengucilan didasarkan pada sistem atau hubungan yang tidak setara dan konstruksi sosial seperti 'ras', 'gender' dan 'status disabilitas', semua domain dipengaruhi oleh struktur, norma dan hubungan sosial yang ada. Semua program perlu mengidentifikasi dan menangani norma dan hubungan kekuasaan yang mendasari yang berdampak pada kelima domain GESI dan di semua tingkat ekosistem.

2. Perdamaian sebagai kondisi di mana individu atau masyarakat merasakan adanya situasi yang harmonis dengan ketiadaan konflik, dan adanya keteraturan atau kepatuhan terhadap institusi keagamaan. Upaya pencegahan konflik perlu diselaraskan dengan intervensi peningkatan pendapatan keluarga, ketersediaan kebutuhan pangan atau rumah yang layak, jaminan pendidikan dan kesehatan serta menciptakan lingkungan nir kekerasan melalui mekanisme penyelesaian masalah melalui pendekatan keagamaan, musyawarah adat ataupun hukum positif yang mengedepankan *restorative justice* karena sumber konflik disebabkan oleh masih adanya pemahaman bahwa konflik dipandang bukan sebagai bagian dari alamiah kehidupan, namun sebagai benturan kepentingan yang berpotensi terjadinya kekerasan komunal. Dalam situasi tertentu kerentanan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki karena keterbatasan partisipasi di ruang publik termasuk terkait mekanisme penyelesaian konflik

Rekomendasi

1. Pengembangan Kapasitas Perempuan Papua

Pengembangan kapasitas perempuan Papua dimulai dari peluang dan potensi peran sosial perempuan yang besar ditengah masyarakat khususnya dalam kelembagaan keagamaan. Memberi kesempatan bagi kaum perempuan dan komunitas pendukung perempuan dalam kegiatan-kegiatan untuk penyelesaian konflik, mengemukakan pendapat, dan mengambil keputusan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan diri perempuan- dan kompetensi perempuan dalam menciptakan perdamaian dan kohesi sosial. Pengembangan kapasitas dilakukan sebagai proses yang mendorong terjadinya perubahan dari berbagai aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan kemampuan untuk mampu merespon situasi dan perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus. Pengembangan kapasitas juga bisa diartikan sebagai usaha terus menerus yang bersifat berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan pribadi ataupun kelompok (Milen, 2001). Perempuan memiliki peran dan potensi besar sebagai agen perubahan di masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan dari pengembangan kapasitas perempuan yaitu pelatihan adanya peningkatan efikasi atau kepercayaan diri dan kompetensi perempuan (dengan berlandaskan refleksi Alkitab) dalam memelihara kerukunan di tengah masyarakat.

Pemberdayaan Perempuan dalam perdamaian, kerukunan dan kohesi sosial dilakukan melalui program pemberdayaan yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, pendidikan dan kesehatan karena faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketenangan hidup atau kedamaian hidup yaitu memiliki pendapatan yang cukup, memiliki rumah yang layak, memiliki jaminan pendidikan, akses kesehatan yang mudah, serta lingkungan yang bebas dari kekerasan. Diharapkan bahwa setelah pelatihan, peserta kaum perempuan mampu merancang rencana tindak lanjut berupa kegiatan yang meningkatkan kohesi sosial, sekaligus menjawab tantangan-tantangan lain di masyarakat (termasuk menjadi agen kerukunan, perdamaian dan kohesi sosial melalui sektor-sektor antara lain

pemberdayaan ekonomi masyarakat). Memberi kesempatan bagi kaum perempuan dan komunitas pendukung perempuan dalam kegiatan-kegiatan untuk penyelesaian konflik, mengemukakan pendapat, dan mengambil keputusan. Pengalaman ini penting untuk menjadi bekal bagi perempuan melakukan hal yang sama di ranah-
ranah lain.

2. *Empower World View* Konteks Perdamaian dan Kohesi Sosial.

Keyakinan dapat berdampak pada pandangan dunia, sikap, dan pandangan orang secara positif dan negatif. *World View* dapat menciptakan budaya fatalisme negatif atau menyalahkan peristiwa buruk atas dosa yang dirasakan orang lain, atau dapat menciptakan budaya kasih sayang dan pelayanan yang positif kepada orang lain, terutama yang lebih rentan. Untuk mendorong dampak iman yang lebih positif ini, perlu digunakan sebuah pendekatan yang disebut *Empower World View* yaitu 'Pandangan Dunia yang Diberdayakan' dalam pekerjaan dan mata pencaharian dan serta ketahanan keluarga. Ini adalah pendekatan berdasarkan penggunaan Kitab Suci dan melibatkan para pemimpin agama, sehingga menggunakan bahasa dan cerita yang akrab dalam konteks lokal dan bekerja dengan para pemimpin agama, pemimpin adat, pemerintah sebagai orang yang berpengaruh dan dihormati.

Memberdayakan mindset melalui kontribusi iman yang unik dan potensial untuk isu-isu global maupun isu-isu lokal termasuk perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. "Pandangan Dunia yang Diberdayakan" adalah pendekatan pembangunan yang memungkinkan berbasis agama untuk memobilisasi dan memberdayakan potensi individu dan komunitas untuk mengubah pola pikir, keyakinan, dan perilaku yang menegaskan identitas, martabat, dan agensi mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam perubahan transformatif yang berkelanjutan. Karena pendekatan tersebut dimulai dari kesamaan keyakinan dan menggunakan bahasa dan ekspresi keyakinan untuk membangun kohesi sosial di komunitas dan memberikan dasar yang kuat untuk memahami pentingnya

menangani isu-isu pengelolaan sumber daya dan meningkatkan pemahaman tentang risiko dan bahaya serta potensi solusi untuk membangun ketahanan masyarakat. Semua institusi agama, institusi adat, dan institusi kampung: pemberdayaan perempuan perlu diarahkan pada upaya mengintrodusir, mendialogkan, dan mencari alternatif solusi yang sensitif gender tentang isu-isu yang membawa kerentanan pada perempuan dan anak, seperti perkawinan anak, hak anak yang dilahirkan diluar pernikahan, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan perempuan tanpa pasangan yang memiliki anak. Mempromosikan peran-peran non tradisional kepada perempuan dan laki-laki untuk mengikis stereotip yang melemahkan perempuan. Selanjutnya perlu membuat kesepakatan seluruh tetua adat, dewan Adat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama sesungguhnya adalah modal sosial baru. Ini adalah kesepakatan bersama yang menjadi energi untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik sebagai dasar kesepakatan nilai positif bersama untuk pemberdayaan perempuan Perempuan

Daftar Pustaka

- B. Suyanto (2018). Mendekonstruksi Belis dan Nasib Perempuan Alor. Accessed On February 6, 2023. <https://geotimes.id/kolom/sosial/mendekonstruksi-belis-dan-nasib-perempuan-alor/>
- Balgah, R.A., Amungwa, F.A., & Egwu, B.M.J. (2019). A Gender Analysis of Intra-Household Division of Labor in Cameroon Using Moser's Triple Roles Framework. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*. 29(4): 1-12, 2019. DOI: 10.9734/AJAEES/2019/v29i430095.
- Bandura, A. (1976). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs. New Jersey: A Paramount Communications Company.
- Coleman, P.T. (2012). Constructive conflict resolution and sustainable peace. In P. T. Coleman & M. Deutsch (Eds.), *Psychological components of sustainable peace* (pp. 55–84). Springer Science + Business Media.
- Dawan, A (2019). Perempuan Alor di Pusaran Budaya Belis. Sebuah Pendekatan Etnografis Melalui Revitalisasi Budaya. *Jurnal Inada*. UKI

- Dawan, A (2022). Menggemakan dan Membumikan MPI (Membangun Paradigma Inklusif). Accessed on February 3, 2023. <https://kabardamai.id/menggemakan-dan-membumikan-mpi-membangun-paradigma-inklusif/>
- Dawan, A. (2022). Peluang Mengembangkan Kohesivitas Pemuda Pemudi Papua. Accessed On Februari 3, 2023 from: <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/peluang-mengembangkan-kohesivitas-pemuda-pemudi-papua>
- I.Susilowati dkk dan Wahana Visi Indonesia (2022). *Laporan Assesment GESI*. Jakarta: Wahana Visi Indonesia.
- Milen, A. (2001). *What Do We Know About Capacity Building? An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*. Geneva: World Health Organization (Department of Health Service Provision).
- Wahana Visi Indonesia dan Tulodo. (2022). *Baseline Study Report NOKEN (Community Transformation for Peace in Papua)*. Jakarta: Wahana Visi Indonesia.
- World Vision (2020). *A Toolkit for Integrating Gender Equality and Social Inclusion in Design, Monitoring and Evaluation*. Jakarta: Wahana Visi Indonesia.
- Y. Widiarti. (2022). Kaitan Kekerasan dalam Hubungan dan Masalah Psikologis. Accessed on February 3, 2023. <https://gaya.tempo.co/read/1563826/kaitan-kekerasan-dalam-hubungan-dan-masalah-psikologis>.